



# KPK Belum Panggil Mendagri

## Kasus E-KTP

**JAKARTA** - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi masih berkeyakinan bahwa proyek e-KTP tidak bermasalah. Namun, lembaga antirasuah tidak memedulikan sikap tersebut karena penyelidikan telah menemukan dua bukti permulaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak buru-buru meminta keterangan dari Gamawan terkait dengan keyakinannya itu.

Jubir KPK Johan Budi S.P. mengatakan bahwa setiap orang punya pandangan tersendiri mengenai dugaan korupsi proyek e-KTP. Apalagi Gamawan saat ini duduk seba-

gai menteri dalam negeri dan menangani proyek tersebut. "Boleh saja punya keyakinan. Tapi, atas penyelidikan KPK, ditemukan dua barang bukti," ujarnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini Gamawan seolah masih tidak percaya bahwa proyek e-KTP bermasalah. Terakhir, dia meragukan adanya penyelesaian teknologi pemindai data. KPK menyebut seharusnya menggunakan *iris technology* atau pemindai retina. Tetapi, yang banyak digunakan adalah pemindai melalui jari meski CPU-nya untuk iris.

KPK juga menyebut ada kerugian negara Rp 1,1 triliun atas proyek itu. Lembaga pimpinan Abraham Samad tersebut makin yakin ada dugaan korupsi setelah ditemukannya dua bukti permulaan. Itu dijadikan dasar menetapkan tersangka. "Ada dugaan itu, tersangkanya S (Sugiharto)," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Mendagri memang bisa saja dimintai keterangan terkait dengan proyek itu. Namun, hingga kini Johan menyebut belum ada jadwal pemeriksaan untuk mantan gubernur Sumatera Barat tersebut. Pemeriksaan Gamawan baru bisa dilakukan kalau penyidik memang membutuhkan.

Dia meminta masyarakat tidak berpolemik terlalu jauh mengenai ada tidaknya keterlibatan Gamawan dalam proyek itu. Sebab, hingga kini pihaknya belum memiliki kesimpulan apa pun terhadapnya. Dia menampik pertanyaan apakah dia termasuk *potential suspect* dalam kasus e-KTP. "Belum ada jadwal (pemeriksaan Gamawan). Pemeriksaan saja belum, sudah ke arah itu," tuturnya.

Secara terpisah, klaim Gamawan bahwa proyek e-KTP bersih dari korupsi juga diragukan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Kalau KPK menyatakan kerugian negara Rp 1,1 triliun, Fitra menyebut Rp 3 triliun.

Menurut Direktur Investi-

gasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi, kerugian tersebut terjadi dalam kurun waktu 2011-2012. Itu terlihat dari minimnya realisasi konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dalam memproduksi e-KTP.

"Realisasi anggaran 2011 dan 2012 Rp 4,6 triliun, sedangkan realisasi pekerjaan konsorsium PNRI sampai 8 Januari 2013 hanya Rp 1,6 triliun," jelas Uchok. Nah, dari selisih itulah muncul kerugian negara Rp 3 triliun.

Angka realisasi anggaran yang disampaikan Uchok bukan bualan. Sebab, dia mengutip data dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasar data tersebut, memang dijabarkan bahwa realisasi anggaran pembayaran kontrak e-KTP 2011 sebesar Rp 1,1 triliun dan 2012 sebesar Rp 3,4 triliun.

Berdasar data BPK juga diketahui alokasi anggaran 2013 untuk e-KTP mencapai Rp 1 triliun. Sayangnya, jumlah produk yang didistribusikan tidak sesuai dengan harapan. Di antara target terdistribusi 172.015.400 e-KTP, yang tersalurkan ternyata tidak sampai separo. "Konsorsium PNRI hanya bisa mendistribusikan 48.122.734 e-KTP ke kecamatan," tutur Uchok. Jumlah itu, lanjut dia, berdasar distribusi hingga 31 Oktober 2012. Hingga 8 Januari 2013, yang terdistribusi 52.887.528 e-KTP atau senilai Rp 846 miliar.

Masalah yang dilihat Fitra tidak berhenti di situ. Masalah juga diendus saat proses lelang yang merugikan negara. Modusnya, mempermainkan harga perkiraan sementara (HPS) yang ditetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK).

"Harga satuan yang tercantum dalam HPS atas perangkat sejenisnya tidak bernilai sama," jelasnya. Selain itu, ada perangkat yang tidak mempunyai harga satuan dalam HPS. Ditambah, spesifikasi blangko e-KTP konsorsium PNRI tidak sesuai dengan spesifikasi. (dim/c7/kim)